

KOSIDIK

KELUARGA HARYANTO TASLAM DI LBH. Belum banyak cerita yang terungkap.

LIPUTAN UTAMA

Cerita Wewegombel dan Orang-Orang Hilang

Sejumlah yang "hilang" mulai pulang. Hanya pengamen di Yogya yang mengadu ke LBH, selebihnya enggan bercerita. Perlu menunggu resolusi Komisi Hak-Hak Asasi Manusia PBB?

DI JAWA, DULU, KETIka pohon-pohon besar dan tinggi masih banyak, ada masanya orang tua bilang kepada anak-anak: "Jangan keluyuran di waktu *surup*, kamu nanti digondol *wewegombel*." *Surup*, itulah magrib; dan *wewe* adalah hantu berambut panjang, bisa terbang, dan suka menculik anak-anak yang kemudian, konon, anak itu ditemukan *nongkrong* di pohon tinggi. Konon, anak yang digondol *wewe*, setelah ditemukan, mulutnya seperti terkunci. Bila kemudian ia sadar lagi, biasanya ia lupa apa yang terjadi.

Kisah orang hilang di Tanah Air belakangan ini seperti kisah *wewe* itu. Yang hilang pun adalah "anak-anak nakal" yang suka "bikin onar". Juga, seperti kisah penculikan oleh *wewe* yang kemudian si anak yang diculik muncul lagi "di pohon tinggi", orang-orang yang muncul lagi kini juga berada di luar Jakarta, padahal konon "hilangnya" di Jakarta. Konon, biasanya, anak yang dibawa *wewe* ketika ditemukan mulutnya seolah terkunci. Barangkali, ia terteror oleh benuk dan perilaku sang *wewegombel*. Siapa tahu, mereka yang muncul lagi dan tak mau bicara pun terteror oleh yang mereka alami selama "hilang".

Yang jelas, para orang tua kita tampaknya tak ingin mengetahui secara persis siapa dan apa itu *wewegombel*—memang hantu atau suatu ide untuk membuat anak-anak patuh duduk di rumah di kala magrib. Juga, di Indonesia sekarang sepertinya pihak kepolisian kurang proaktif, melainkan menunggu laporan. Bahkan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terkesan pasif. Misalnya, kenapa mereka tak menemui yang muncul lagi yang tak mau bercerita kepada wartawan sekalipun itu (Pius Lustrilanang, Haryanto Taslam, umpamanya)?

Sejauh ini, yang mencoba menemui me-

reka yang muncul lagi itu adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Dan, memang, mereka yang ditemui YLBHI itu, menurut Bambang Widjojanto, ketuanya, belum bersedia bercerita apa pun. Pokoknya: diam.

Ada yang tertarik dan tampaknya bakal mencari tahu apa dan siapa di balik "hilang dan muncul kembalinya" sejumlah orang itu. Itulah yang bernama Komisi Tinggi Hak-Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Swiss. Komisi ini, Selasa, 21 April pekan ini, merencanakan merapatkan perlu-tidaknya membuat resolusi anti-Indonesia sehubungan dengan orang-orang hilang dan penegakan hak asasi manusia pada umumnya. Menurut anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Marzuki Darusman, "Terbuka kemungkinan sidang akan menjatuhkan resolusi anti-Indonesia."

Bila itu memang terjadi, citra Indonesia bakal buruk di mata internasional. Dan, siapa tahu, itu bakal menghambat upaya reformasi ekonomi karena para penanam modal asing takut *wewegambel*.

Tapi, ada yang diberitakan hilang kemudian muncul lagi dan mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogayakarta. Itulah enam pengamen yang tergabung dalam Serikat Pengamen Indonesia- Yogyakarta. Mereka (Wawan, Subroto, Miftachul Ulum, Ferdinandus Suhardono alias Dono, Tofik Kustoro, dan Didik Setyarso Nugroho) kepada LBH bercerita yang terjadi selama mereka hilang. Mereka diciduk dari tempat mangkalnya atau dijemput petugas berpakaian preman dari rumah masing-masing. Dan semua penangkapan itu sama: tanpa surat tugas. "Mereka menculik klien kami tanpa surat tugas atau surat perintah penangkapan," kata Budi Hartono dari LBH tersebut, kuasa hukum enam pengamen itu.

Demonstran Bayaran?

Menurut Dono, pada awalnya, mereka dibawa ke panti sosial milik Departemen Sosial di Bantul, di pinggir Yogya. Menjelang tengah malam, mereka diangkut ke Markas Polisi Resor Kota (Mapolresta) Yogyakarta. Apa salah para pengamen itu?

Di mapolresta itulah mereka diinterogasi, ditanya soal keterlibatan mereka dalam demonstrasi mahasiswa. Mereka tak cuma ditanya, tapi bergantian digebuki dan ditendang, diinjak. "Ada teman kami yang mulutnya dicokol pistol sambil diancam. Jika tidak mau mengaku, mereka akan mematahkan tulang-tulang kami," tutur Dono.

Beberapa jam, mereka "diinterogasi". Setelah itu, mereka dikembalikan ke panti sosial yang dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Hal ini berlangsung berulang-ulang, selama tiga hari, sampai mereka dilepas pada Selasa siang, 7 April lalu. Selama itu tak secuil pun kabar sampai ke telinga keluarga mereka. Bahkan, ketika orang tua Dono dan Wawan mencoba mencari anaknya ke mapolresta, mereka menerima jawaban begini: polisi tak tahu-menahu.

Khusus untuk Wawan tampaknya masalahnya belum selesai. Setelah dilepaskan, kembali ia diculik dan dibawa ke sebuah tempat yang ia tak tahu di mana itu. Di sana, Wawan lagi-lagi harus mengalami interogasi dan penyiksaan, termasuk direndam di dalam air selama berjam-jam. "Aparat keamanan telah memperlakukan mereka secara tidak manusiawi," kata Hillarius N.G. Memo, juga pengacara LBH Yogya.

Menurut Budi, penyiksaan itu dilakukan karena petugas mendapat informasi bahwa para pengamen adalah demonstran bayaran. Mereka disangka turut dalam aksi demo karena memperoleh imbalan berupa uang. Tampaknya, para penculik ingin tahu siapa yang membayar mereka. Lantaran memang tak pernah menerima imbalan, para pengamen itu pun menolak tuduhan tersebut. "Demi Tuhan, kami tidak dibayar siapa pun," ujar Dono. Akibat penyiksaan itu, seorang pengamen mengalami luka dalam serius dan dua lainnya harus dijahit di sana-sini.

Cerita selanjutnya belum jelas. Kepala Polresta Yogyakarta Letkol Boedhi Santoso M. tetap menganggap para pengamen itu tak termasuk mereka yang hilang. Polisi juga menampik tuduhan telah menahan mereka. "Mereka hanya kami mintai keterangan," kata Boedhi. Sebabnya: info dari seorang bocah tukang semir sepatu yang mengaku disuruh para pengamen untuk turut demo dan mendapat upah Rp 5.000. Setelah itu, polisi lantas menyerahkan mereka kepada Departemen Sosial, "Karena, mereka tak punya identitas yang jelas."

Beberapa jam, mereka "diinterogasi". Setelah itu, mereka dikembalikan ke panti sosial yang dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Hal ini berlangsung berulang-ulang, selama tiga hari.... Selama itu, tak secuil pun kabar sampai ke telinga keluarga mereka.

Belum Berani

Boleh jadi, itu baru satu macam modus "hilangnya" para aktivis. Mungkin, ada juga modus hilang ala Maqbul Halim. Mahasiswa Jurusan Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Ujungpandang yang dikenal vokal itu raib selama lima hari. Belakangan, setelah berita keraibannya muncul di koran daerah, menurut Kepala Dinas Penerangan Kepolisian Daerah Sulawaesi Selatan Mayor H.R Bagus Santoso, Maqbul dikabarkan telah melapor ke Kepolisian Sektor Belawa di Kabupaten Wajo, sekitar 250 kilometer dari Ujungpandang. Kepada polisi, ia mengaku pulang ke kampung halamannya di Wajo untuk menghadiri pernikahan seorang kerabatnya.

Tapi, hingga pekan lalu belum seorang pun yang mengaku melihat langsung keadaan Maqbul. Kakak kandungnya, Mahyudin, mengaku hanya menerima telepon dari adiknya itu. Di mana Maqbul sebenarnya masih belum jelas. Yang pasti, Panglima Komanda Daerah Militer Wirabuana Agum Gumelar telah memerintahkan jajarannya untuk mencari Maqbul.

Menurut catatan YLBHI, setidaknya masih ada 14 orang lagi (termasuk dua sopir) yang belum kembali ke rumahnya. Menurut Ketua YLBHI Bambang Widjojanto, pihaknya telah mengirim utusan untuk menjumpai langsung para aktivis yang telah pulang. Tapi, hingga kini sayangnya belum banyak cerita yang terungkap. Desmon J. Mahesa, Direktur LBH Nusantara, misalnya, mengaku tak tahu siapa yang menangkapnya dan di mana ia disekap karena matanya terus ditutup. Akan halnya Pius, menurut YLBHI, belum bisa ditemui. YLBHI berjanji akan terus berusaha agar mereka yang "hilang dan kembali" bersedia menceritakan pengalamannya selama tak diketahui rimba belantaranya itu. "Tapi mereka belum berani," kata Bambang.

Jadi, apa yang terjadi? Sulit; dugaan bisa saja dikatakan, tapi itu belum tentu benar, dan juga belum tentu salah. Yang tampaknya masuk akal, mereka yang muncul punya komitmen dengan penculiknya agar tak menceritakan yang terjadi. Dan tentunya, bila mereka terpaksa bungkam, melanggar komitmen berat risikonya. Dengan kata lain, ada ancaman yang membuat mereka tak mau bercerita. Bisa jadi juga mereka memang tak tahu apa-apa karena matanya ditutup, misalnya.

Yang jelas, bila tetap tak ada kisah sebe-



MARZUKI DARUSMAN. Terkesan pasif.

namnya tentang hilangnya Haryanto Taslam, Pius, dan Desmond setidaknya, itu berarti para penculik—satu kelompok atau lebih tak ada bedanya—berhasil membuat diri mereka tetap misterius. Dan, karena itu, bukan tak mungkin aktivitas mereka terus berjalan. Lumrah bila kemudian ketakutan melingkupi siapa saja.

Tak jelas ada kaitannya dengan mereka yang hilang—dan kembali—atau tidak, ada sinyalemen aktivitas penculikan terus berlangsung. Aktivis Suara Ibu Peduli, Dr. Karlina Leksono-Supelli, misalnya, mengaku sempat dua kali dikomit orang-orang kekar. "Mulanya, saya pikir saya GR (gede rasa) saja," tuturnya. Tapi, setelah ada telepon dari seorang kenalannya, dosen Universitas Indonesia itu baru menyadari peristiwanya. (lihat *Karlina Leksono "Nyaris" Hilang*).

Cerita Dua Tahun Lalu

Orang memang lumrah kalau menduga bahwa penculikan ini berkaitan dengan aparat keamanan. Alasannya: menjalankan penculikan dan tetap misterius perlu latihan. Dan, latihan seperti ini agak sulit terpikirkan bisa terjadi di luar lingkungan aparat keamanan.

Tapi, pagi-pagi, Kepala Pusat Penerangan ABRI Brigjen Abdul Wahab Mokodongan membantahnya dengan jelas dan tegas. "ABRI tak ada hubungannya dengan hilangnya sejumlah aktivis," kata Abdul Wahab. Pimpinan ABRI bahkan telah memerintahkan seluruh jajarannya untuk turut mencari para aktivis itu (lihat D&R edisi 11 April).

Menteri Dalam Negeri Hartono pun mengeluarkan pernyataan senada. ABRI, menurut Hartono, wajib turut mencari para aktivis yang hilang itu. Cuma, soal berhasil-tidaknya, itu urusan lain. Artinya, ABRI tak harus bertanggung jawab atas keselamatan mereka. "*La, wong ilang karepe dhewe* (hilang maunya sendiri), kok, dibilang tanggung jawab ABRI. Coba *ngumpet* seminggu di rumah gubuk sana sambil *ngopi* kan menghilang," kata Hartono.

Sementara itu, Mayjen Syamsu D., Komandan Puspom ABRI juga mengharapkan agar masyarakat tidak cepat-cepat membawa masalah orang hilang ke lembaga internasional karena akan mencoreng kredibilitas bangsa. "Seyogianya, kita selesaikan dengan aturan kita sendiri," kata Syamsu.

Baiklah, tapi apa lalu tindakannya? Polisi pun sejauh ini tak terdengar menghubungi Pius atau Desmond untuk mendapatkan cerita kedua orang yang hilang dan muncul lagi itu. Pun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mestinya bisa lebih tanggap. Andai memang ada ancaman kepada yang muncul lagi, bukankah polisi bisa memberikan perlindungan?

Waihasil, tetap merisaukan bahwa tak ada cerita apa yang telah terjadi itu. Ada memang beberapa catatan di YLBHI, tapi itu cerita dua tahun lalu. Misalnya, kisah bekas Ketua Umum Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi, Munif Laredo. Munif sempat hilang sekitar dua bulan, seusai peristiwa kerusuhan pengambilalihan kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia di Jalan Diponegoro, Jakarta, 27 Juli 1996. Kepada YLBHI, ia bercerita penderitaan yang dialaminya selama ia hilang. Siapa membuatnya menderita? Ia tak bisa memastikan. Apakah ada hubungan antara hilangnya Munif dan orang-orang hilang belakangan ini, pun tak jelas.

Yang jelas, kecemasan tentang hilang itu mendasari berdirinya Komisi Pencegahan Tindak Kekerasan dan Orang Hilang (Kontras), Kamis, 9 April, dua pekan lalu. Kontras didukung 10 lembaga swadaya masyarakat (antara lain YLBHI, Aliansi Jurnalis Independen, Komite Independen Pemantau Pemilu, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Pusat Informasi dan Pengkajian Hak Asasi Manusia, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, LA-Pasip, dan LP-HAM) dan tokoh-tokoh senior, seperti cendekiawan Nurcholish Madjid, pengacara Harjono Tjitrosoebeno, dan Trimoelja D. Soerjadi. Menurut Munir, pelaksana harianya, Kontras memusatkan perhatiannya ke masyarakat yang, karena aktivitas politiknya dihilangkan atau menghilangkan diri akibat tekanan, mengalami perlakuan hukum yang tidak adil serta mengalami teror dan ancaman.

Barangkali, semakin banyak lembaga yang mengungkapkan soal orang hilang makin tak mudah seorang warga negara di negeri merdeka ini tiba-tiba raib dan tiba-tiba muncul dengan mulut terkunci. Apa kita perlu menunggu resolusi Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dan datangnya *special rapporteur*? Bukan cuma Dana Moneter Internasional (IMF) di bidang ekonomi dan moneter, juga untuk membuat warga negara Indonesia merasa aman dan terlindungi di negara sendiri perlu lembaga asing ikut "meronda"?

Di Jawa, kisah *wewegombel* tak lagi dipercaya anak-anak. Pohon-pohon besar sudah berganti menjadi instalasi listrik, gedung-gedung, atau kawasan tempat pohon tumbuh sudah menjadi wadak. Modernisasi telah mengusir takhayul dan sejenisnya. Mungkin, diperlukan modernisasi dalam menyelenggarakan negara agar orang hilang tak perlu ada lagi. Modernisasi di situ bisa diterjemahkan sebagai demokrasi, hadirnya oposisi, dan sebuah *civil society* atau masyarakat madani. Kata *civil* atau madani mengandung makna beradab. Penghilangan orang jelas bukan sesuatu yang beradab.

Laporan Budi Nugroho, Sano Joko Suyono (Jakarta), I.N. Idayanie (Yogyakarta), Tomi Lebang (Ujungpandang), Dwi Arjanto (Solo)

Karlina Leksono "Nyaris" Hilang

AKTIVIS SUARA IBU PEDULI—KELOMpok perempuan yang melakukan penjualan susu murah—Karlina Leksono Supelli belum lepas dari "cobaan". Jika Februari lalu ia ditangkap dan disidang lantaran melakukan aksi protes kenaikan harga sembilan bahan pokok di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, pada Rabu pekan lalu, 15 April, ia nyaris masuk daftar orang hilang.

Berikut penuturan Karlina kepada D&R seputar pengalamannya itu.

"Hari Rabu memang waktu mengajar saya di Pascasarjana Universitas Indonesia (UI). Siang itu—sekitar pukul 13.00—jalanan begitu macet karena ada aksi mahasiswa. Akhirnya, saya turun dari taksi di depan RSCM (Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo) dan berjalan ke Jalan Salemba. Saya lihat banyak polisi, termasuk di antaranya Kapolres (Kepala Kepolisian Resor) Jakarta Pusat Letnan Kolonel Iman Haryatna yang dulu memerintahkan menangkap saya. Ketika mau masuk pintu gerbang ada yang teriak, 'Tolong, *bukain* pintu buat ibu ini karena ibu ini mau *ngajar*.' Yang teriak sepertinya anak UI. Kemudian, saya masuk dan mengajar sampai pukul 15.00.

Setelah selesai mengajar, suasana masih ramai, jadi saya menunggu dulu di halaman. Setelah lima belas menit, saya berjalan ke arah pintu gerbang. Karena enggak ada kendaraan, saya ingin naik taksi. Tiba-tiba, ada orang yang mendekati dan bilang, 'Ibu perlu taksi?' Saya kira tukang parkir, tapi saya enggak kenal wajahnya. Saya sudah bertahun-tahun di UI dan umumnya saya kenal tukang parkir.

Dalam keadaan ragu-ragu, orang tersebut sudah menyetop taksi dan membukakan pintu. 'Silahkan, Bu,' katanya. Nah, pada saat pintu terbuka dan saya mendekat tiba-tiba ada dua orang lagi datang dan melingkar di belakang saya. Badannya besar... rambutnya, wajahnya... Saya kaget dan cepat berpikir, kalau saya masuk bisa-bisa orang tiga ini juga ikut-ikut masuk. Jadi, saya bilang enggak jadi dan langsung berjalan secepat mungkin ke arah Cipto.

Tiga orang tadi masih mengikuti saya dalam jarak dekat, mungkin cuma setengah meter. Setiap kali saya menengok ke belakang, mereka langsung menatap saya. Wah, ada apa ini. Semula, saya berjalan agak di pinggir trotoar Salemba. Waktu itu, banyak mobil yang diparkir dan saya pikir, kalau ada yang *narik* saya, enggak akan ada yang lihat, jadi saya pindah dan jalan di tengah Jalan Salemba. Ketiga orang itu masih terus mengikuti.

Di dekat persimpangan lampu merah Rumah Sakit Carolus, saya lihat ada taksi kosong. Begitu taksinya lewat, tanpa menunggu berhenti, secepat kilat, saya langsung berjalan berbalik, memotong jalan ketiga orang itu. Saya buka pintu taksi dan langsung masuk. Agak tegang saat itu, tapi saya masih mengira saya paranoid, GR (gede rasa) saja.

Setengah jam kemudian, di dalam taksi, saya terima telepon dari keluarga. 'Lin, kamu di mana? Kamu aman-aman saja?' 'Lo, kenapa?' saya balik bertanya. Katanya, mereka terima telepon dari salah seorang kenalan yang mengatakan 'tolong dicek Karlina sampai di rumah dengan selamat apa tidak; saya lihat dia diikuti tiga orang.' Oh, kalau begitu, benar, saya enggak cuma GR. Kemudian, saya enggak langsung pulang, mampir dulu ke Kafe Cemara, minum-minum. Setelah saya lihat aman, saya pulang.



KARLINA LEKSONO. **Saya pikir ini sudah enggak main-main lagi.**

Sebenarnya, itu kejadian yang kedua. Yang pertama, mungkin tidak terlalu 'serius', terjadi sekitar awal Maret sesudah sidang kedua. Saya janji dengan dua wartawan di Mal Pondok Indah (Jakarta Selatan). Kemudian, saya bilang, 'Kalau mau *ngobrol*, di mobil saja karena saya mau langsung pulang.' Karena sopir saya harus menjemput suami saya, akhirnya kami bertiga (Karlina dan dua wartawan) mencegat taksi. Taksi pertama tidak mau, dengan alasan daerah yang kami tuju macet. Setop taksi kedua sama juga jawabannya. Saya pikir apa benar begitu atau karena wajah saya, orang takut.

Kami bertiga berdiri di pinggir jalan. Tiba-tiba, *out of the blue*, enggak tahu dari mana, muncul satu orang berbadan besar, bawa HT (*handy talky*), dan mendekat. 'Ibu, kok, enggak jadi naik taksinya,' kata orang yang baru datang itu, dua kali. Meskipun heran, saya waktu itu enggak *mikir* apa-apa. Kemudian, wartawan itu bilang, 'Jangan-jangan, orang tersebut sudah mengikuti kita sejak dari mal.'

Saya sudah menceritakan semua itu kepada pengacara saya. Pengacara dan keluarga saya sudah pernah bilang supaya ke mana-mana jangan pergi sendiri. Rumah saya juga pernah diawasi. Tapi, kemudian, saya pikir rasanya enggak apa-apa, kok, sendiri. Tapi, setelah kejadian Salemba kemarin, saya pikir ini sudah enggak main-main lagi. Jadi, saya usahakan, kalau pergi, enggak sendiri."

Budi Nugroho

Haryanto Taslam:

"... Saya Tidak Berubah"

Haryanto Taslam muncul dari raibnya, tapi belum mau bercerita. Akan melapor kepada Megawati dulu, katanya.

SAMA MISTERIUSNYA: KETIKA HARYANTO Taslam, Wakil Sekjen PDI versi Musyawarah Nasional (Munas) 1993, raib 8 Maret lalu dan ketika ia tiba-tiba diketahui berada di Hotel Satelit, Surabaya, pekan lalu. Yang pertama tak jelas proses "hilang"-nya; yang kedua juga tak jelas bagaimana tiba-tiba ia berada di hotel itu. Ia pun merahasiakan kapan persisnya ia masuk hotel tersebut.

Yang jelas, Haryanto, 44 tahun, mengaku pertama kali mengontak keluarganya di Jakarta pada Jumat pagi, 17 April. "Saya sekarang ada di Jawa Timur dan dalam keadaan sehat," begitu tuturnya kepada D&R, tentang kata-katanya lewat telepon kepada istri dan ayahnya. Ayah dan ibunya, yang tinggal di Mojokerto, Jawa Timur, beberapa hari setelah ramai kabar hilangnya Haryanto, ke Jakarta untuk menemani menantunya.

Setelah mengontak keluarganya, Haryanto menelepon Megawati Soekarnoputri yang Ketua DPP PDI dan Sucipto yang Ketua PDI Jawa Timur—versi Munas 1993.

Sabtu sore pekan lalu, 18 April, Nyonya Ani Agustina, istri Haryanto, beserta keluarganya langsung ke Surabaya naik kereta Argo Bromo. Minggu pagi, setelah bertemu di hotel, Haryanto dan keluarganya meluncur ke Mojokerto, tempat tinggal orang tuanya.

"Sekarang saya sudah lega. Dulu, saya gelisah sekali," ujar Taslam, 75 tahun, ayah Haryanto, kepada D&R. Sejak anaknya pulang, rumah Taslam di Kompleks Perumahan Wikarsa, Mojokerto, langsung dikunjungi banyak orang: tetangga, saudara, warga PDI, dan para wartawan.

"Saya khawatir ia hilang disekap. Sekarang kan banyak aktivis yang hilang," ujar Ny. Ridwan, Bendahara PDI Kabupaten Mojokerto. "Saya menduga, hilangnya Haryanto karena soal politik. Ada pihak yang ingin menyingkirkan dia," kata Sugimin, Wakil Ketua DPC PDI Kotamadya Mojokerto.

Benar? Haryanto, bapak dari tiga anak, memilih diam. Ia tak menolak ditemui wartawan, tapi ia tidak bersedia menceritakan bila ditanya soal hilangnya. "Tentang soal itu, sementara ini saya *no comment* saja," kata alumni Jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya, Jakarta, itu.

Ia tampak agak kurus, lebih bersih, dan tampak letih. Yang tak berubah, di sela-sela pembicaraannya, ia suka tertawa dan terus mengisap rokok.

Berikut petikan wawancara **Zed Abidin**, wartawan D&R di Surabaya, yang dilakukan bersama sejumlah wartawan dengan Haryanto Taslam, Minggu sore, 19 April, di Mojokerto.

Anda, kok, tambah kurus?

Ya, susut sedikitlah. Tapi, berat tubuh saya masih di atas 80 kilogram. Tapi, saya sekarang merasa lebih *fit*.

Kapan Anda kontak dengan keluarga?

Saya kontak telepon dengan keluarga pada Jumat pagi. Kepada istri dan bapak, saya bilang saya kini berada di Jawa Timur dan dalam keadaan sehat walafiat. Pagi itu sebenarnya keluarga saya mau datang ke rumah Bambang (Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), tapi saya cegah sebab saya baik-baik di Jawa Timur. Saya minta mereka ke Surabaya saja. Hal yang sama juga saya katakan kepada Ibu Megawati dan Pak Cip (Sucipto, Ketua PDI Jawa Timur) bahwa saya ada di Jawa Timur. Siangnya, Bambang Widjojanto juga mengontak saya lewat telepon. Jadi, tidak betul (berita bahwa) saya mengontak Bambang lebih dahulu.

Jadi, sejak 8 Maret itu, Anda hilang, menghilang, atau dihilangkan?

Sementara ini saya *no comment*. Saya juga minta tolong kepada Anda agar saya dan keluarga diberi ketenangan. Ini memang mengagetkan. Bapak saya yang sudah tua harus ke Jakarta, sementara anak saya di sini sendirian (satu anak Taslam ikut kakeknya di Mojokerto).

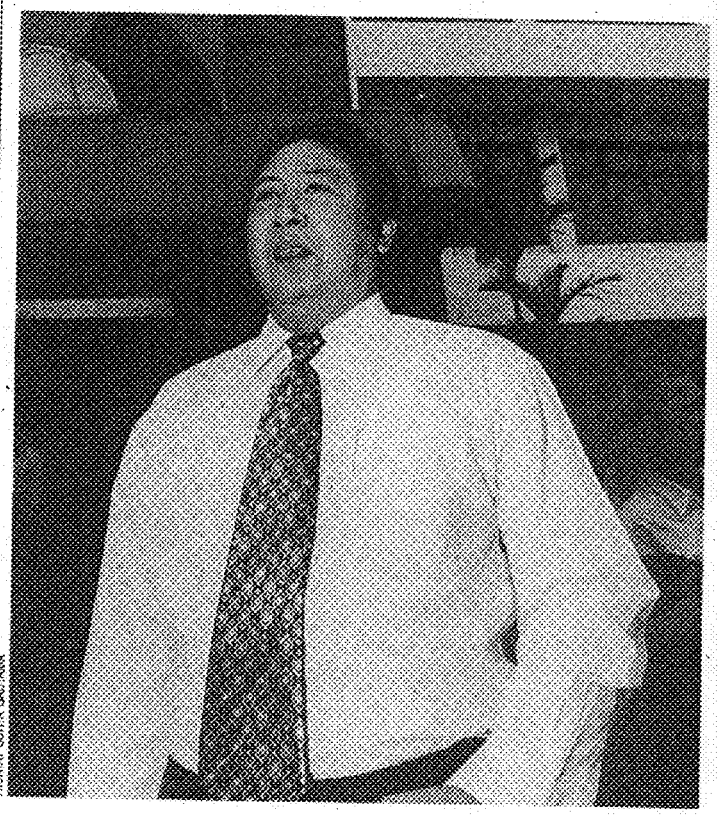


FOTO: AYAT SURYA GAUTAMA

Hal-hal mengenai saya, saya minta waktu duhulah. Nanti, dalam waktu dekat, saya akan ke Jakarta untuk melaporkan kepada Ibu Megawati mengenai hal-ihwal saya. Yang jelas, saya gembira bisa bertemu dengan keluarga dan teman-teman. Tapi, secara prinsipiil, diri saya tidak berubah. Saya rileks saja dan tak ada suasana yang tegang.

Mungkinkah kasus Anda ini dikaitkan dengan sejumlah aksi sebelum sidang umum?

Pertanyaan Anda itu aneh. Pekerjaan saya sejak dulu di belakang meja dan bukan di lapangan. Sebagai Wakil Sekjen PDI, pekerjaan saya adalah hal-hal yang berkaitan dengan administrasi organisasi. Sekadar contoh saya bukan orang lapangan, waktu terjadi unjuk rasa PDI di Departemen Dalam Negeri sehubungan dengan kongres di Medan, saya satu-satunya pengurus DPP PDI yang tidak turun ke jalan. Waktu ada mimbar bebas di DPP PDI sebelum Peristiwa 27 Juli 1996, semua naik panggung, kecuali saya. Bukan saya tidak punya kemampuan naik panggung, tetapi secara fungsional itu bukan wilayah saya.

❖

Rapor Merah di Mata Dunia

KASUS "ORANG HILANG" tampaknya cukup merepotkan pemerintah Indonesia. Apalagi, masalah itu dikabarkan masuk agenda persidangan Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, pekan ini. Pada akhir sidang, Selasa, 21 April ini, komisi akan mengeluarkan resolusi mengecam Indonesia atas perlakuan tak manusiawi itu.

Bila resolusi anti-Indonesia muncul, "Itu bisa membentuk citra negatif terhadap Indonesia," kata Menteri Kehakiman Muladi. Dan, itulah pula kali kedua Indonesia terbidik resolusi di bidang pelanggaran hak asasi. Tahun lalu, resolusi Komisi Hak Asasi PBB menyangkut soal penyiksaan dan penangkapan di Timor Timur.



SISA BENTROKAN MAHASISWA UGM DENGAN APARAT. Indonesia dikritik tajam.

Menurut anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Clementino Dos Reis Amaral, kali ini pun peluang Indonesia untuk menghambat keluarnya resolusi kecaman itu sangat kecil. Pasalnya, resolusi tahun lalu tak ditanggapi pemerintah Indonesia. Akibatnya, "Pada sidang Komisi Hak Asasi PBB, Indonesia dikritik tajam," tutur Amaral.

Selain itu, sambung Amaral, isu pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia di sidang komisi kali ini bobotnya lebih berat ketimbang tahun lalu. Rapor kondisi hak asasi di Indonesia kini disejajarkan dengan negara-negara pelanggar berat, seperti Myanmar, Somalia, Sudan, Guetemala, dan Korea Utara.

Sidang Komisi Hak Asasi PBB berlangsung setiap tahun, membahas perkembangan pelaksanaan hak sipil dan politik di negara-negara anggota PBB. Acuannya: Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik *(International Covenant on Civil and Political Right)*, yang diberlakukan sejak tahun 1976.

Pada perjanjian internasional itu, yang dilindungi antara lain hak hidup, hak kebebasan dan keamanan diri, hak kesamaan di peradilan, hak kebebasan berpikir dan beragama, hak mempunyai pendapat tanpa gangguan, hak kebebasan berkumpul secara damai, dan hak berserikat.

Sampai Februari 1993 sudah 115 negara—termasuk Filipina—meratifikasi perjanjian tersebut. Konsekuensinya, negara-negara itu terikat untuk melaksanakan isi perjanjian sekaligus mengukuhkan pada hukum nasionalnya.

Citra Internasional

Akan halnya Indonesia hingga kini belum meratifikasi perjanjian internasional tersebut. Jadi, secara formal, Indonesia tak terikat dengan perjanjian itu, demikian pula dengan resolusi Komisi Hak Asasi PBB.

Namun, soalnya, sebuah resolusi nan mengecam tentu bisa digunjingkan pada pergaulan internasional. Misalnya, Indonesia lantas dianggap sebagai negara pelanggar hak asasi. Mungkin, karena itu pula, berbagai kiat diplomasi terus diupayakan Indonesia menjelang sidang komisi hak asasi itu.

Contohnya, Menteri Luar Negeri Ali Alatas kini di Jenewa, berunding dengan perwakilan Inggris di Uni-Eropa—yang mengajukan resolusi mengecam Indonesia. Maksudnya: untuk menghindari konfrontasi langsung. "Jalan keluar yang diupayakan Pak Alatas adalah memunculkan *chairman statement*," kata Direktur Jenderal Politik Luar Negeri, Nugroho Wisnumurti.

Menurut Nugroho, resolusi yang diajukan Uni-Eropa tak berkaitan dengan Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, apalagi soal orang hilang. "Masalah orang hilang kan belum pasti itu kesalahan pemerintah. Penyidikannya belum selesai. Jadi, tak ada alasan mengajukan resolusi," kata Nugroho.

Resolusi yang kini dihadapi Indonesia, sambungnya, lebih menyangkut masalah pelanggaran hak asasi di Timor Timur. Pemrakarsanya tak lain Portugal—yang tergabung dalam Uni-Eropa. Toh, "Apa pun hasilnya nanti, kita akan menolak. Karena, kita tahu itu hanya manuver politik Portugal," ujar Nugroho, tegas.

Sebagai negara yang belum meratifikasi Perjanjian Internasional Hak Sipil dan Politik, Indonesia berhak menolak resolusi. Hanya, rapor Indonesia akan bertambah merah. Salah satu upaya mengoreksi rapor adalah mengundang *special rapporteur*, semacam tim khusus penelaah fakta, dari Komisi Hak Asasi PBB.

Hal itu pernah dua kali dilakukan pemerintah Indonesia, yakni kedatangan *special rapporteur on torture* pada tahun 1993 dan *special rapporteur on disappearances* pada tahun 1994. Tahun ini, Komisi Hak Asasi PBB bermaksud mengirim *special rapporteur* ke Indonesia.

Akankah Indonesia menolaknya, seperti tahun lalu? "Pada prinsipnya, kita enggak takut. Cuma, waktunya masih dipertimbangkan," ujar Menteri Ali Alatas. Tapi, soalnya bukanlah takut atau berani, namun lebih pada komitmen untuk menegakkan hak asasi manusia. Sebab itu, tak mengherankan bila mantan guru besar ilmu politik di Universitas Indonesia Prof. Miriam Budiardjo menyatakan bahwa sudah saatnya Indonesia meratifikasi Perjanjian Internasional Hak Sipil dan Politik. "Kita perlu meratifikasi *covenant* yang sudah menjadi salah satu dokumen internasional yang penting itu," kata Miriam.

I.H./ Laporan Rachmat H. Cahyono dan Dody A. Sahputra